

SKRIPSI



KEDUDUKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM SIDANG PERKARA PIDANA

(Studi Kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid. B/2012/PN. Mks)

OLEH

IKA HARDIANTI

B111 10 044

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2014

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) SAKSI SEBAGAI
ALAT BUKTI SURAT DALAM SIDANG PERKARA PIDANA**

(Studi Kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid.B/2012/PN.Mks)

OLEH :

IKA HARDIANTI

B 111 10 044

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada

Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

KEDUDUKAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI SURAT DALAM SIDANG PERKARA PIDANA

(Studi Kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid. B/2012/PN. Mks)

Disusun dan diajukan oleh

IKA HARDIANTI

B 111 10 044

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ika Hardianti

Nomor Induk : B111 10 044

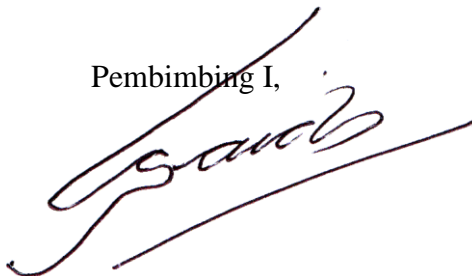
Bagian/Kekhususan : Hukum Acara

Judul Proposal : Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Sebagai
Alat Bukti Surat Dalam Sidang Perkara Pidana (Studi Kasus:
Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid.B/2012/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2013

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 19620711 198703 1 001

Pembimbing II,



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama : Ika Hardianti

Nomor Induk : B111 10 044

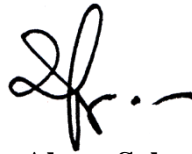
Bagian/Kekhususan : Hukum Acara

Judul Proposal : Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Sebagai
Alat Bukti Surat Dalam Sidang Perkara Pidana (Studi Kasus:
Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid.B/2012/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2013

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Ika Hardianti, B11110044, Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Sidang Perkara Pidana (Studi Kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid.B/2012/PN.Mks) dibawah bimbingan Bapak **M. Said Karim** sebagai Pembimbing I dan Ibu **Haeranah** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam sidang peradilan pidana dan untuk mengetahui keabsahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi sebagai alat bukti surat dalam sidang peradilan pidana (Studi Kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid.B/2012/PN.Mks).

Penelitian ini dilaksanakan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diambil dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan .

Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Berkas perkara dari penyidik digunakan sebagai dasar acuan bagi hakim untuk memulai memeriksa suatu perkara dalam persidangan. Selain itu pula berita acara penyidikan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan. Peranan berita acara penyidikan bukan hanya sebagai bahan acuan pemeriksaan, karena apabila dalam jalannya persidangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh masing-masing pihak baik saksi maupun terdakwa dalam penyidikan, maka dapat digunakan pula untuk mengusut ataupun memperjelas hal-hal yang tidak sesuai tersebut (2) Akan lebih tepat jika suatu BAP penyidikan saksi yang dibuat oleh seorang penyidik dikualifikasi sebagai bahan bagi pembuktian atau dengan kata lain dijadikan sebagai bahan acuan untuk memulai suatu pemeriksaan perkara daripada sebagai alat bukti, sebab proses dalam pembuatan BAP tersebut adalah bagian dari persidangan itu sendiri dalam suatu proses dalam perkara pidana

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Karunia, dan Hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “**Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Sidang Perkara Pidana (Studi Kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid.B/2012/PN.Mks)**”, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Serta lantunan shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan seluruh umatnya.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga penulis utamanya ibu penulis atas segala doa, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, kesabaran, dan dukungan yang begitu tulus dan tak henti-hentinya kepada penulis.
2. Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil rektor, staf, dan jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara dan Ibu Andi Syahwiah, S.H., M.H., selaku sekretaris Bidang Studi Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menulis skripsi dan menentukan pembimbing.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan merupakan keberuntungan bagi penulis telah dibimbing oleh beliau-beliau, ‘guru’ yang saya banggakan.
6. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., dan BapakKaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku dewan penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan selama penyusunan skripsi penulis.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, terkhusus Pak Mustari yang tidak jemu mengijinkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Bapak Imran Arief, S.H., M.H., dan Pak Hakim, Andi Astara, S.H., yang telah bersedia menyisihkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Seluruh dosen, pegawai, maupun staf civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, serta bantuan lainnya.
10. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu setia mendengar cerita-cerita tidak penting penulis,Mulfha Indah Sari, Octavia Wandasari, Fitriana Rakhma Rasyid. Penulis tidak pernah bertemu dengan orang-orang seperti kalian sebelumnya, yang

senantiasa memberi kritikan pedis tanpa saringan (tapi saya tahu, itu semata-mata untuk kebaikan), terima kasih kawan atas segala kebersamaan, ocehan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan.

11. Partner of everything, Fitriana Rakhma Rasyid, teman satu atap sejak 3 tahun terakhir ini (semoga tidak bosan melihatku mulai dari bangun sampai tidur lagi ☺) yang telah mengetahui dan mau menerima segala sifat dan sikap baik maupun buruk yang ada pada diri penulis dan telah memberikan begitu banyak masukan. Terima kasih atas kebersamaan, pengertian, dan bantuan (terkhusus dalam proses penyelesaian skripsi ini).
12. Tim National Moot Court Competition (NMCC) ALSA 2011, kanda Muh. Fadhil, S.H., Zaldi, S.H., Musakkir, S.H., Andi Wahyuni Paramitha, S.H., Mustainah, S.H., Risky Utami, S.H., Sri Handayani, S.H., Nur IKhsan Fiandy, S.H., Arabia S.H., Aulia Susantri, S.H., Mikel Kelvin, dan saudaraku Jumardi, Adi Suriadi, serta Andi Mekasari, walaupun kebersamaan kita hanya sekitar 2 bulan, tapi penulis sangat bangga bisa mengenal dan mengukir prestasi bersama kalian.
13. Senior-senior ALSA, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas segala bimbingan dan pengalaman yang dibagikan kepada kami, Tim MCC 2011.
14. Para pengurus ALSA LC UNHAS yang telah memberi penulis kesempatan merasakan dunia organisasi kampus.

15. Teman-teman LEGITIMASI 2010, teman seperjuangan penulis sejak berstatus sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unhas.
16. Teman-teman KKN Reguler Gel. 85 Kec. Malili – Luwu Timur, atas pengalaman yang telah dilalui bersama.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah lainnya yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, utamanya bagi penulis sendiri.

Makassar, Januari 2014

Penulis,

IKA HARDIANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A.....L	
atar Belakang Masalah	1
B.R	
umusan Masalah	4
C.T	
ujuan Penelitian	4
D.....M	
anfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A.	P
enyidikan	6
1.....	P
engertian Penyidik	6
2.....	P
engertian Penyidikan	8
3.....	T
ugas dan Wewenang Penyidik.....	8
4.....	P
enyidikan terhadap Saksi	11
B.	B
erita Acara Pemeriksaan.....	17
C.	P
embuktian Dalam Perkara Pidana	20
1.....	P
embuktian pada Umumnya.....	21
2.....	H
al yang Secara Umum Diketahui Tidak Perlu Dibuktikan	24

D.....	S
istem Pembuktian	43
1. <i>Positive Wettelijk Bewijs Theorie</i>	43
2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan	
Keyakinan Hakim Melulu	44
3. <i>Laconviction Raisonnee</i>	44
4. <i>Negatief Wettelijk</i>	45
E. Alat Bukti Surat.....	45
 BAB III METODE PENELITIAN	 53
A.....	L
okasi Penelitian	53
B.	J
enis Data	54
C.	S
umber Data	54
D.	T
eknik Analisis Data	55
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 56

A.	P
eranan Berita Acara Pemeriksaan dalam Sidang Peradilan Pidana.....	56
B.	K
eabsahan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Surat dalam	
Sidang Peradilan Pidana (Studi Kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No.	
1799/Pid.B/2012/PN.Mks)	61
 BAB V PENUTUP	65
A.	K
esimpulan	65
B.	S
aran	66
 DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu tindak pidana dimuka persidangan pengadilan. Penerapan hukum materil dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi di pengadilan, kasus mencerminkan atau mewujudkan keadaan prosedural disamping keadilan substantif, artinya hakim dalam menerapkan ketentuan hukum materil harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, oleh karena itu dikatakan bahwa ketentuan hukum acara pidana bertujuan untuk mempertahankan hukum pidana materil. Fungsi hukum acara pidana menurut Van Benmelen adalah¹:

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan

Berdasarkan pendapat tersebut hukum acara pidana dalam rangka penegakan hukum pidana menduduki peran yang sangat penting dan menentukan, khususnya dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materil.

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8

Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan apa yang akan diambil. Putusan yang akan diambil oleh hakim itu sendiri didasarkan pada kebenaran materil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan perundang-undangan, dalam hal ini hukum acara pidana. Pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang dapat membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan.

Namun sebelum memasuki proses pemeriksaan di muka persidangan, aparat kepolisian membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan saksi-saksi. Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan terhadap saksi maupun ahli, demi untuk terang dan jelasnya tindak pidana yang disangkakan. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak

asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan ialah tindakan penyidik untuk meminta keterangan dari saksi tentang hal-hal yang ia dengar dan/atau lihat dan/atau alami sendiri dalam suatu peristiwa pidana, beserta alasan pengetahuan saksi tersebut, keterangan mana kemudian dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi (yang selanjutnya disebut BAP Saksi). Pemeriksaan saksi tersebut dikatakan oleh R. Soesilo sebagai proses perolehan keterangan guna mencari bukti dalam melakukan tindakan penyidikan. Interogasi merupakan tindakan memeriksa atau mendengar keterangan orang yang dicurigai dan saksi-saksi, yang juga dapat diperoleh di tempat kejahatan. Dari berbagai keterangan saksi pada pemeriksaan pendahuluan, dalam tahap penyelesaian berita acara penyidikan, ada sebagian dimasukkan sebagai saksi di dalam BAP Saksi, dan yang sebagian lagi, karena dianggap tidak perlu, maka tidak dimasukkan.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kualitas hidup yang diharapkan makin lama makin meningkat dan untuk penegak hukum tentunya kualitas kerjanya harus juga makin lama makin meningkat. Tentunya tidak ingin suatu pemeriksaan baik mulai penyidikan sampai penuntutan itu, segala sesuatu yang dihasilkannya adalah karena paksaan sehingga tidak mustahil terjadi setelah terdakwa diperiksa di muka persidangan dia mengubah berita acaranya itu dengan suatu pengakuan, bahwa pada waktu diperiksa ia mengalami ancaman

ataupun paksaan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi sebagai Alat Bukti Surat Dalam Sidang Perkara Pidana (Studi Kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid.B/2012/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana peranan Berita Acara Pemeriksaan dalam sidang peradilan pidana?
2. Bagaimana keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai alat bukti surat dalam sidang peradilan pidana (Studi kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid.B/2012/PN.Mks)?

C. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Untuk mengetahui peranan Berita Acara Pemeriksaan dalam sidang peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai alat bukti surat dalam sidang peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi masukan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan berita acara pemeriksaan penyidikan dan peranannya dalam sidang peradilan pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c. Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Mengenai pengertian penyidik, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal I butir ke-1 yang berbunyi Penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Petugas yang berwenang tersebut menurut Pasal 6 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Untuk pejabat polisi Negara Republik Indonesia tidak semua mempunyai tugas penyidikan, tugas tersebut dibebankan kepada pejabat kepolisian tertentu, yaitu pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat letnan dua polisi. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang melakukan penyidikan, kegiatannya dibawah koordinasi dan pengawasan pejabat polisi yang berhak melakukan penyidikan penuh. Pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan berfungsi membantu polisi dalam bidang

penyidikan, sehingga hasil dan sidikan diserahkan kepada penyidik utama, yaitu disebut penyidik pembantu. Dalam Pasal I butir ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang.

Hubungan Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- i) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri (Pasal 7 ayat (2) KUHAP).
- ii) Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik memberikan petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP).
- iii) Penyidik Pegawai Negeri Sipil melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidik kepada Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2) KUHAP).
- iv) Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyerahkan hasil penyidikan yang telah selesai kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP)
- v) Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil menghentikan penyidikan, segera memberitahukan kepada Penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat 3)

2. Pengertian Penyidikan

Apabila telah selesai dilakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan itu telah pula dilaporkan dan diuraikan secara rinci, maka apabila dari hasil penyelidikan itu dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan penindakan. Tahap penindakan adalah tahap penyidikan dimana dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan pelanggaran hak-hak asasi seseorang yang bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana.

Pengertian penyidikan sendiri telah dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Penyidik polisi Negara khusus diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak menemukan dan mengumpulkan barang-barang bukti, keterangan-

keterangan sehubungan dengan fakta kasus pelanggaran hukum pidana. Kewenangan Penyidik tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. melakukan tindakan peratma pada saat ditempat kejadian.
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. mendatangkan orang ahli yang dipadukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. mengadakan penghentian penyidikan
- j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada penyidik, maka penyidik dibebankan untuk membuat berita acara atas semua tindakannya (Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 75 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan harus ditanda tangani oleh si pembuat berita acara dan oleh pihak

yang terlibat dalam tindakannya tersebut (Pasal 75 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Penyidik dalam usahanya mencari dan menemukan tersangka dan bahan-bahan pembuktian maka penyidik dapat memanfaatkan petunjuk Praktis yang menjadi bahan menyusun langkah-langkah kegiatan dalam rangka penyidikan yang berupa tujuh pertanyaan yang terkenal dengan teori “7kah”². Dengan mencari ketujuh pertanyaan itu, maka maksud penyidikan perkara akan tercapai dan bila dilakukan dengan cermat akan sangat mengurangi kesalahan dalam penyidikan perkara pidana.

Tujuh pertanyaan yang harus dicari jawabannya itu adalah sebagai berikut:

- i) Apakah ; dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta tentang tindak pidana yang terjadi dengan semua akibatnya
- ii) Dimanakah ; dimaksudkan untuk mencari tempat dimana tindak pidana itu dilakukan atau kasus diteliti dan berhubungan dengan kompetensi relative pengadilan atau kejaksaan.
- iii) Dengan apakah ; dimaksudkan untuk mencari alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
- iv) Mengapakah ; dimaksudkan untuk mengungkapkan alasan-alasan, niat, motif, dan tujuan melakukan tindak pidana.

² Soedjono Dirjosisworo, *Kriminalistik*, Tribisono Karya, Bandung, 1976, hal. 46

- v) Bagaimanakah ; dimaksudkan untuk mencari dan mengetahui cara melakukan tindak pidana atau modus operandi.
- vi) Bilamanakah ; dimaksudkan untuk mengetahui saat terjadinya perbuatan pidana (*tempus delicti*).
- vii) Siapakah ; dimaksudkan untuk menemukan pelaku sebenarnya dan semua orang yang tersangkut dalam tindak pidana.

Dengan menjawab ketujuh pertanyaan itu dapat dianggap bahwa pekerjaan pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan telah selesai. Kasus tindak pidana yang telah jelas dan terang siapa pelakunya dan dilengkapi dengan alat-alat pembuktian yang lengkap maka penyidik menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Penyerahan berkas perkara itu dilakukan dalam dua tahap:

1. Tahap pertama, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka.
2. Tahap kedua, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti (Pasal 8 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

4. Penyidikan terhadap Saksi

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan saksi dengan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa.

Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dipisah dalam aturan pasal yang berbeda.

Kesenjangan memisah penguraian pemeriksaan tersangka dan saksi atau ahli, dimaksudkan untuk memudahkan mengamatisecara terpisah tanpa campur aduk. Hal seperti ini lebih menjernihkan penegrtian bagi yang mempelajarinya. Berhubung oleh karena itu, pembahasan mengenai pemeriksaan saksi, akan diuraikan sesingkat mungkin, dan diharapkan selalu mendudukan permasalahan pemeriksaan saksi dikaitkan dengan cara pemeriksaan tersangka sebagaimana yang diuraikan pada bagian terdahulu.

Sekadar hal-hal yang penting dalam tata cara pemeriksaan saksi dapat diuraikan seperti berikut³:

- a. Dalam memberikan keterangan kepada penyidik, harus terlepas dari segala macam tekanan baik yang berbentuk apa pun dan dari siapa pun. Hal ini serupa dengan yang digariskan kepada tersangka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1).
- b. Saksi seperti halnya tersangka dapat diperiksa oleh penyidik di tempat kediaman saksi, dengan jalan penyidik datang ke tempat kediamannya. Hal seperti ini ditempuh oleh penyidik, apabila saksi tidak dapat

³ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahn, dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 142

memenuhi panggilan menghadap di tempat pemeriksaan yang ditentukan penyidik, disebabkan alasan yang patut dan wajar.

Untuk mempermasalahkan halangan yang patut dan wajar, diingatkan kembali agar halangan itu diuji dengan teori “impossibilitas yang absolut”, yaitu halangan yang sedemikian rupa objektif dan logis sehingga benar-benar saksi berada dalam keadaan “ketidakmungkinan yang mutlak” untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Saksi secara objektif berada dalam keadaan sangat sulit menghadapi pemeriksaan. Bukan alasan ketidakmungkinan yang nisbi yang didasarkan pada subjektifitas yang tidak logis. Dengan jalan mempergunakan teori impossibilitas, makna Pasal 113 jangan mudah dipermainkan oleh seorang saksi yang dipanggil untuk diperiksa.

- c. Seorang saksi yang hendak diperiksa, tapi bertempat tinggal atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum penyidik, pemeriksaan saksi yang bersangkutan dapat didelegasikan pelaksanaan pemeriksaannya kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal atau kediaman saksi (Pasal 119). Tapi harus diingat, bukan mesti diperiksa oleh penyidik di tempat tinggal saksi. Sifatnya adalah dapat dibebankan pemeriksaannya kepada pejabat penyidik di wilayah hukum tempat tinggal kediaman saksi.

- d. Salah satu prinsip pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, saksi diperiksa tanpa disumpah. Lain halnya pemeriksaan saksi di muka persidangan pengadilan, sebelum diperiksa atau didengar keterangannya, saksi bersumpah atau berjanji lebih dulu. Terhadap prinsip ini ada pengecualian. Saksi dalam pemeriksaan penyidikan dapat dibebani untuk bersumpah, apabila ada cukup alasan untuk menduga bahwa saksi tidak akan dapat hadir nanti sebagai saksi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Alasannya para saksi tidak disumpah pada pemeriksaan di muka penyidik, agar saksi tidak terikat memberi keterangan sebenarnya di muka sidang pengadilan. Sebab kala disumpah di depan pemeriksaan penyidikan, berarti baik saksi maupun persidangan pengadilan, sudah terikat secara mutlak kepada keterangan tersebut. Tidak dapat mengubah atau mengutarakan kebenaran yang dikehendaknya. Keadaan seperti ini jelas mengurangi nilai pemeriksaan pengadilan dalam mencari, menemukan, dan mewujudkan kebenaran materil yang dikehendaki penegakan hukum.

- e. Prinsip pemeriksaan yang lain adalah diperiksa secara terpisah satu per satu. Undang-undang tidak melarang untuk mempertemukan para saksi. Namun, prinsip cara pemeriksaan satu per satu dengan bergiliran, demi untuk kemurnian keterangan saksi. Kalau diperiksa secara bersamaan,

kemungkinan besar akan hilang kemurnian kesaksian akibat pengaruh langsung atau tidak langsung dari saksi lain.

- f. Keterangan yang dikemukakan saksi dalam pemeriksaan penyidikan, dicatat dengan teliti oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan. Prinsip pencatatan keterangan saksi serupa dengan pencatatan keterangan tersangka: dicatat sesuai dengan kata yang digunakan saksi. Pendapat ini didasarkan pada sistematika Pasal 117 yakni pada ayat (1) dijelaskan, keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apapun. Ayat (2) memang tidak dirangkai lagi dengan saksi, tapi hanya menyebutkan tersangka saja, yang menentukan prinsip, agar keterangan tersangka dicatat dengan teliti oleh penyidik sesuai dengan kata yang digunakan tersangka sendiri. Ditinjau dari segi sistematika antara ayat (1) dan (2) Pasal 117, kedua ayat ini sama-sama ditujukan kepada pemeriksaan tersangka dan saksi, lagi pula tidak mungkin dibedakan prinsip pencatatan keterangan saksi. Seandainya prinsip pencatatan keterangan yang disebutkan tidak berlaku kepada pencatatan keterangan saksi, dan hanya kepada tersangka saja, hal ini pasti menimbulkan kesewenangan dan kecurangan dalam mencatat keterangan saksi. Atau akan menjurus kepada pemeriksaan saksi untuk menandatangani keterangan yang bukan diberikannya, sebab dia

disudutkan pada suatu posisi harus menandatangani berita acara yang lain dari apa yang dikehendakinya.

g. Berita acara yang berisi keterangan saksi ditandatangani oleh penyidik dan saksi. Dalam penandatanganan berita acara pemeriksaan, harus diperhatikan dua hal:

- 1) Saksi menandatangani berita acara pemeriksaan setelah lebih dulu isi berita acara tersebut disetujuinya (Pasal 118 ayat (1)).
- 2) Undang-undang memberi kemungkinan kepada saksi untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kalau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Catatan tersebut berupa penjelasan alasan yang menjadi penyebab saksi menolak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Cuma Pasal 118 ayat (2) tidak menyebut satu per satu alasan penolakan apa yang dapat dipergunakan saksi untuk tidak menandatangani berita acara pemeriksaan. Sedang penjelasan Pasal 118 ayat (2) hanya bersifat umum, yang berbunyi:

“Dalam hal saksi tidak mau menandatangani berita acara ia harus memberi alasan yang kuat”

Membaca penjelasan ini, bukan semakin memperjelas alasan penolakan, tapi semakin kabur, sebab penjelasan itu hanya merupakan penekanan pada kualitas alasan, namun tidak merinci alasan itu sendiri.

Barangkali satu-satunya alasan yang paling relevan dalam penolakan tersebut, apabila saksi berpendapat apa yang tertulis dalam berita acara pemeriksaan, tidak bersesuaian dengan maksud dan kebenaran keterangan yang diberikan. Atau isi berita acara jelas-jelas bertentangan dan berbeda dengan keterangan yang diberikan atau berdasar paksaan atau intimidasi⁴.

B. Berita Acara Pemeriksaan

Tujuan Pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan, sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum. Akan tetapi didalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam pasal 121 KUHP.

⁴ *Ibid*, hal. 144

Seperti yang telah disinggung di atas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang di perlukan dianggap cukup, penyidik “atas kekuatan sumpah jabatan “ segera membuat berita acara dengan persyaratanpersyaratan yang ditentukan dalam pasal 121 KUHAP :

1. memberi tanggal pada berita acara,
2. memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan,
3. nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi-saksi,
4. keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, bangsa, agama, dan lain-lain),
5. catatan mengenai akta dan benda,
6. serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP. Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan pasal 75 KUHAP. Hal ini berarti, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang hal itu telah diterangkannya dalam berita acara

pemeriksaan. Jadi, dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, penyidik melampirkan berita acara (Pasal 75 ayat (1) KUHAP):

1. pemeriksaan tersangka,
2. penangkapan (jika ada)
3. penahanan (jika ada),
4. penggeledahan (jika ada),
5. pemasukan rumah (jika ada),
6. penyitaan benda (jika ada),
7. pemeriksaan surat (jika ada), dan
8. pemeriksaan saksi (jika ada).

Berita acara penyidikan dan lampiran-lampiran yang bersangkutan, dijilid menjadi suatu berkas oleh penyidik. Jilidan berkas berita acara disebut “berkas perkara”. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.

Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat polisi ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) diatas. Berita acara yang dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP ini diperuntukkan bagi pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum. Sedangkan berita acara yang menyangkut jalannya persidangan diatur dalam Pasal 202 KUHAP, yang mensyaratkan cukup ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.

Berita acara yang tercantum dalam ayat (1) huruf a sampai huruf h adalah menyangkut tugas penyidikan, sesuai dengan tugas penyidikan dalam menjalankan kewajiban (Pasal 121 KUHAP). Tugas penyidik adalah menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan yang berupa berita acara sebagai berkas perkara. Dari hasil pemeriksaan penyidikan tersebut lalu dibuat oleh penyidik suatu kesimpulan yang pada umumnya disebut resume. Dalam resume tersebut diuraikan secara singkat keterangan-keterangan yang telah diberikan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan.

C. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai di mana batas minimum

kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

1. Pembuktian pada Umumnya

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana⁵, antara lain:

- a. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 274

dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah digariskan undang-undang.

Terutama bagi majelis hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

- b. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif”, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem

pembuktian. Tidak berbau dan diwarnai oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim.

Ditinjau dari segi hukum acara pidana sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP, telah diatur beberapa pedoman dan penggarisan:

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa sangkalan atau bantahan yang beralasan dengan saksi yang meringankan maupun dengan alibi.
- c. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maskudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternative, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primer tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Dalam hal ini, arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya

dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasar dakwaan tindak pidana yang telah terbukti.

2. Hal yang Secara Umum Diketahui Tidak Perlu Dibuktikan

melengkapi uraian pengertian pembuktian, perlu juga dibicarakan mengenai apa yang dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (2) yang berbunyi :

“Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.

Mengenai pengertian “hal yang secara umum diketahui” ditinjau dari segi hukum, tiada lain daripada perihal atau keadaan atau *omstandigheide* atau *circumstance*, yakni hal ikhwa atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal tersebut memang sudah demikian hal yang sebenarnya atau sudah semestinya demikian. Atau bisa juga berarti berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan “resultan” atau kesimpulan yang demikian, yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasar pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu senantiasa menimbulkan akibat yang pasti demikian.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata/pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat-alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

a. Pengertian

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut:

1) Dalam pengertian saksi, terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu:

- a) Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.

- b) Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. (Pasal 1 angka 26 KUHAP).
- c) Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (RUU Perlindungan Saksi Pasal 1 angka 1).

2) Kesaksian

Dalam pengertian kesaksian, terdapat beberapa pengertian yaitu⁶:

- a) Menurut R. Soesilo adalah “suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri”.
- b) Menurut Sudikno Mertokusumo, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan

⁶ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hal. 250

dilarang atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang, yang dipanggil di pengadilan.

3) Keterangan saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27

KUHAP adalah:

“Salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

b. Syarat dan penilaian keterangan saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi 2 syarat, yaitu:

1) Syarat formil

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambahan peneyeaksian yang sah lainnya.

2) Syarat metril

Bahwa keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materil,

akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Untuk suatu penilaian keterangan saksi sebagaimana menurut Pasal 185 KUHAP, bahwa:

- a) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- d) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

(1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain

(2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

(3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu

(4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya

f) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

c. Hak-hak saksi

Saksi didalam memberikan kesaksian atau keterangan dalam suatu perkara pidana undang-undang telah memberikan hak-hak, sebagaimana telah diatur di dalam KUHAP, sebagai berikut:

- 1) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173 KUHAP)
- 2) Hak untuk mendapatkan penerjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia (Pasal 177 KUHAP)

- 3) Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah (Pasal 178 ayat (1) KUHAP)
 - 4) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat (1) KUHAP)
 - 5) Hak untuk mendapat biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal 229 ayat (1) KUHAP)
- d. Dapat didengar sebagai saksi

Pada umumnya semua orang atau siapa saja dapat didengar keterangannya atau menjadi saksi, kecuali sebagaimana dimaksud menurut Pasal 168 KUHAP, bahwa yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, adalah:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama sama sebagai terdakwa
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga

- 3) Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Jadi orang-orang tersebut berdasarkan Pasal 168 KUHP, ialah mempunyai hak untuk mengundurkan diri dari kesaksian, namun dapat memberikan kesaksian apabila menurut Pasal 169 ayat (1) KUHP, apabila saksi itu menghendaknya sendiri dan penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, maka dapat memberikan keterangan dengan sumpah, tetapi sebaliknya apabila penuntut umum dan terdakwa tidak menyetujuinya, maka menurut Pasal 169 ayat (2) KUHP tetap diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

- e. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi

Selain itu, orang yang sama sekali tidak dapat didengar atau memberikan keterangannya atau sebagai saksi atau dapat mengundurkan diri dalam suatu perkara pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP, yaitu mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.

- f. Saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah

Demikian pula terdapat saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan tapi tidak disumpah sebagaimana menurut Pasal 171 KUHP, yaitu:

- 1) Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin
- 2) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali

g. Jenis-jenis saksi

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas 2, yaitu:

- 1) Saksi a charge (saksi yang memberatkan terdakwa)

Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, bahwa dalam hal ada saksi yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

- 2) Saksi a de charge (saksi yang meringankan/menguntungkan terdakwa)

Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.

h. Sanksi terhadap saksi

Seorang saksi yang telah dipanggil secara wajar untuk memberikan keterangannya di pengadilan, bila mengabaikannya, maka menurut Pasal 224 KUHP, bahwa apabila diperlukan kesaksiannya oleh penyidik atau pengadilan dengan sengaja tidak menjalankan suatu kewajiban menurut undang-undang yang harus ia penuhi, misalnya kewajiban untuk datang pada sidang dan memberikan keterangan keahliannya, dapat dikenakan perkara pidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau dikenakan perkara lain dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 bulan.

Jadi untuk dapat dikenakan Pasal 224 KUHP diatas, orang atau ahli tersebut telah dipanggil menurut undang-undang oleh hakim untuk menjadi saksi, baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara perdata, dan dengan sengaja tidak mau memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang harus ia penuhi.

Di dalam Pasal 522 KUHP, bahwa barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda, maka menurut R. Soesilo⁷, bahwa pengertian dari pasal tersebut, adalah dipanggil sebagai saksi dan sebagainya menurut undang-undang, artinya dipanggil untuk menjadi saksi dan sebagainya di muka pengadilan (hakim), jadi bukan di muka jaksa (penuntut umum) atau Polisi (penyelidik/penyidik).

Jadi apabila pada saat saksi dijemput dan akan dibawanya itu segan dan melawan dengan tenaga kepada petugas (polisis) yang akan membawanya, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan Pasal 212 KUHP, bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan

⁷ R. Sosesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta penjelasan Pasal Demi Pasal*, Pen. Politeia, Bogor, 1981, hal. 291

pejabat, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp450.000,-.

Demikian pula saksi ini dapat dikenakan menurut Pasal 216 ayat (1) KUHP, bahwa barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000,-.

Saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah untuk hadir di persidangan, namun saksi menolak untuk hadir di persidangan atau menolak bersumpah atau berjanji tanpa alasan yang sah di depan sidang sebelum memberikan kesaksian atau keterangan, maka menurut Pasal 161 KUHP, yaitu:

- 1) Dalam hal saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan

surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara paling lama 14 hari.

- 2) Dalam hak tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Demikian pula saksi yang telah memberikan keterangan palsu di persidangan, sebagaimana menurut Pasal 174 KUHP, yaitu:

- 1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- 2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- 3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah

palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

- 4) Jika perlu hakim ketua sidang menagguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai.

2. Keterangan Ahli

a. Pengertian

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- 2) Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

b. Hal-hal Mengenai Keterangan Ahli

Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian

dibidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana tanpa keterangan ahli.

Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahap-tahap penyidikan, baik dalam tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, maupun penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana terror dengan bom, pembakaran/kebakaran, pencemaran lingkungan, computer, uang palsu, mutilasi.

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya, akan tetapi dengan berdasarkan keahlian, keterampilan, pengalaman, maupun pengetahuan yang dimiliki dapat memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu membuat terangnya suatu perkara.

3. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo⁸, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baacan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Demikian pula menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

⁸ Andi Sofyan, *op cit*, hal. 284

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP, bahwa yang dimaksud alat bukti petunjuk adalah:

- a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- b. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - 1) Keterangan saksi
 - 2) Surat
 - 3) Keterangan terdakwa
- c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arfi dan bijaksana setelah

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti berupa keterangan terdakwa adalah:

- a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- c. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- d. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Jadi berdasarkan Pasal 189 KUHAP, bahwa keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di luar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti di sidang saja.

Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa untuk dirinya sendiri, artinya keterangan terdakwa satu dengan yang lain tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya.

Dalam hal keterangan terdakwa saja di dalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat-alat bukti lainnya.

6. Barang Bukti

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian di atas, namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan, namun dalam HIR Pasal 63-67 disebutkan, bahwa barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti dapat dibagi atas:

- a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana
- c. Barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana
- d. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana

Barang yang merupakan objek peristiwa pidana dapat dipergunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara objek tidak bernyawa dan objek bernyawa. Demikian pula barang yang dipergunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana dan barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Jadi barang-barang bukti sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian dalam suatu peristiwa pidana.

D. Sistem Pembuktian

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem tersebut bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).⁹

Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti di Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo Saxon. Di Negara-negara tersebut, belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs Theorie*)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 249

alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal.

Menurut Simons¹⁰, bahwa sistem atau teori pembuktian ini bertujuan untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan pada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan

¹⁰ *Ibid*, hal. 251

keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP (dahulu Pasal 294 HIR). Dalam penjelasan pasal tersebut, sudah jelas bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

E. Alat Bukti Surat

1. Pengertian surat sebagai alat bukti

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada pasal 187 KUHAP. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan,
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti¹¹:

- a. “Berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi:

- 1) Memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan
- 2) Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Jadi, pada dasarnya surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut disini ialah surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, tapi agar surat resmi yang bersangkutan dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuatnya. Misalnya, surat resmi itu menerangkan bahwa A dan B telah datang menghadapnya pada suatu hari, dan menjelaskan kepadanya untuk membuat keterangan tentang pembayaran atau

¹¹ Yahya Harahap, *op cit*, hal. 306

pengembalian barang yang dipinjamkan, dan pejabat yang bersangkutan melihat sendiri pembayaran atau pengembalian barang tersebut. Dalam surat keterangan resmi yang demikian, sudah terpenuhi syarat-syarat yang ditentukan, asal dalam surat itu ada penegasan bahwa surat itu dibuatnya atas sumpah jabatan.

- b. Surat yang berbentuk “ menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

Jenis surat ini boleh dikatakan hamper meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijaksanaan eksekutif. Mulai dari surat izin penduduk, surat tanda lahir, dan sebagainya. Semua surat ini dapat bernilai sebagai alat bukti surat.

- c. Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat besar keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya. Mengenai hal ini tidak perlu lagi diuraikan, sebab tentang bentuk surat ini, sudah cukup ditanggapi sehubungan dengan uraian sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Telah dijelaskan bahwa alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan dapat disamakan dengan alat bukti keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya seperti yang dirumuskan pada Pasal 187 huruf c KUHAP.

d. “surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Tentang ketentuan Pasal 187 huruf d ini, bisa menimbulkan masalah. Bunyi kalimat pertama Pasal 187 menegaskan, surat yang dianggap sah sebagai alat bukti ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Padahal surat yang disebut huruf d adalah “surat pada umumnya”. Bukan surat berita acar atau surat keterangan resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Juga bukan surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan dan tidak pula surat keterangan ahli yang dibuat oleh seorang ahli. Tampaknya kalimat pertama Pasal 187 tidak konsisten mendukung isi ketentuan huruf d. sehubungan dengan hal tersebut, secara nyata terdapat beberapa perbedaan antara surat yang disebut pada huruf a, b, dan c pada satu pihak, dengan surat yang disebut pada huruf d pada pihak lain:

- 1) Bentuk surat yang disebut pada huruf a, b, dan c adalah surat resmi yang dibuat pejabat yang berwenang atau berdasar ketentuan atau surat keterangan ahli yang bersifat khusus mengenai keadaan tertentu yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.
- 2) Bentuk surat yang disebut pada huruf a, b, dan c dengan sendirinya bernilai sebagai alat bukti yang sah, sejak surat itu diperbuat,
- 3) Sedang surat pada huruf d merupakan:

- a) Bentuk surat pada umumnya, yakni surat yang tidak termasuk pada huruf a, b, dan c tetapi lebih bersifat surat pribadi, surat-menyurat atau korespondensi, surat ancaman, surat pernyataan, surat petisi, pengumuman, surat cinta, surat selebaran gelap, tulisan berupa karangan baik berupa novel, puisi, dan sebagainya,
- b) Tidak diperbuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya diperbuat tanpa sumpah,
- c) Dan surat huruf d tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sureat bentuk ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti atau pada dirinya melekat nilai pembuktian, apabila isi surat yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain. Nilainya sebagai alat bukti, tergantung pada isinya. Apabila isinya tidak ada hubungan dengan alat pembuktian yang lain, surat bentuk yang lain tidak mempunyai nilai pembuktian.

Selanjutnya khusus mengenai bentuk surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf d, dapat lagi dipersoalkan dari dua segi¹²:

- a. Dari segi redaksi

Redaksinya berbunyi: “surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain. Kita lihat

¹² Yahya Harahap, *op cit*, hal. 308

redaksinya ini agak tidak jelas mulai dari kalimat ...”jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.” kita ingin bertanya, apa maksud kalimat ini? Apakah ”isi” surat itu yang harus ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain atau bagaimana? Kalau isi pembuktian itu yang harus ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain, maka pengertian yang seperti ini tampak bertentangan dengan redaksi yang diatur pada huruf d tersebut. Sebab kalau menurut redaksi, jika ada hubungannya ”dengan isi alat pembuktian yang lain”. Jika kita bertitik tolak pada bunyi redaksi ini, yang harus ada hubungannya dengan surat itu adalah ”isi dari alat pembuktian yang lain”. Bukan isi surat itu yang harus ada hubungannya dengan alat bukti yang lain. Tapi harus sebaliknya, isi alat pembuktian yang lain itu harus ada hubungannya dengan surat. Jadi, *an sich* dari redaksi ketentuan ini, agak terdapat keganjilan susunan kalimat. Akan tetapi, ditinjau dari segi pengertian, tidak ada perbedaan. Kalau isis suatu surat ada hubungannya dengan alat pembuktian yang lain, dengan sendirinya dapat dikatakan isi alat pembuktian yang lain itu ada hubungannya dengan surat yang bersangkutan. Atau sebaliknya, kalau isi alat pembuktian yang lain itu ada hubungannya dengan isi suatu surat, dengan sensirinya isi surat itu mempunyai hubungan dengan alat pembuktian yang lain.

- b. Dari segi penilaian pembuktian

Di dalam ketentuan huruf tersebut, dengan tegas dinyatakan bentuk "surat lain" hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Jadi, bentuk "surat lain" yang diatur dalam huruf d "hanya dapat berlaku" jika isinya mempunyai hubungan dengan alat pembuktian lain. Nilai berlakunya masih "digantungkan" dengan alat bukti yang lain. Kalau isi surat itu atau kalau alat pembuktian yang lain itu terdapat saling hubungan, barulah surat itu berlaku dan dinilai sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, redaksi huruf d itu sendiri menganulirnya sebagai alat bukti surat. Karena bentuk "surat lain" ini baru bernilai sebagai alat bukti surat jika ada hubungan "isinya" dengan isi alat pembuktian yang lain. Menurut logikanya, suatu surat yang harus bergantung pada alat bukti yang lain, tentu pada dirinya sendiri belum melekat sifat alat bukti. Artinya, kalau "surat lain" tadi mesti digantungkan lagi dengan alat bukti lain, baru dia bernilai sebagai alat bukti, sudah jelas pada diri bentuk "surat lain" tadi tidak terdapat suatu nilai alat bukti. Dengan demikian, bentuk "surat lain" ini tidak dapat dikategorikan alat bukti surat. Semestinya undang-undang menyebutnya sebagai alat bukti petunjuk, yakni alat bukti petunjuk yang ditarik sehubungan dengan kaitan persesuaiannya dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, ditinjau dari segi teoritis, apalagi dilihat dari segi praktik hukum tidak tepat menyebut bentuk surat lain sebagai alat bukti surat, tapi lebih sesuai menerapkannya sebagai alat bukti petunjuk. Penjernihan semacam ini sangat penting dalam penegakan hukum, guna menghindari petugas pelaksana hukum

menerapkannya secara keliru. Dikhawatirkan akan terjadi main serampangan dalam praktik, terutama bagi pelaksana yang kurang teliti dan hati-hati tanpa pikir panjang akan menilai setiap surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa dapat memudahkan penulis untuk mengadakan dan memperoleh data penelitian.

B. Teknik Pengumpulan Data

Karya ilmiah merupakan salah satu sarana untuk mengemukakan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Karena itu, kebenaran dari suatu karya ilmiah harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan yang merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi obyek penelitian, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, website dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan obyek yang diteliti.

C. Jenis Data

Data yang dimaksudkan, yaitu fakta atau keterangan yang diperoleh dari obyek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah :

a) Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu yang terdapat di Pengadilan Negeri Makassar.

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan keterangan yang dapat mendukung data primer, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur-literatur, dokumen-dokumen dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini, sumber data diambil dari:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang memberikan keterangan pendukung bagi sumber data primer, meliputi:

- 1) Bahan Hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang hukum acara pidana, penyidikan, berita acara pemeriksaan, serta tentang peradilan pidana.

E. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis dan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber data primer maupun sekunder, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebutlah yang akan disajikan secara deskriptif oleh penulis guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah terhadap hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Berita Acara Pemeriksaan dalam Sidang Peradilan Pidana

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal hal tersebut tidak benar. Oleh karena itu hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan memepertimbangkan nilai pembuktian. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Suatu kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang terdapat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan orang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang

dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.¹³

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa karena mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Pernah diadakan percobaan di suatu sekolah di Swedia, para murid dikumpulkan dalam suatu kelas kemudian seseorang tamu masuk ke kelas itu sejenak kemudian kembali keluar lagi. Setelah murid-murid ditanya apakah pakaian tamu tadi, maka jawabnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan berbaju biru, ada yang mengatakan baju abu-abu, dan bahkan ada yang menyebut baju coklat¹⁴

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 273

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 246

Tindakan penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan, karena pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (*power and authority*) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan tindak pidana umum berbeda dengan negara lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda. Wewenang polisi untuk menyidik merupakan hal yang tidak mudah dan sangat sulit. Penyidikan yang dilakukan tentu diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Dalam hal penyidikan sudah dilakukan tetapi berakhir dengan pembebasan, tentu akan merugikan nama baik polisi dalam masyarakat. Demikian pula dengan hasil dari penyidikan yang telah dilakukan terhadap suatu kasus yang dituangkan dalam berita acara penyidikan, tentunya bisa diharapkan berguna bagi pemeriksaan berikutnya. Penyidikan telah diarahkan pada proses pembuktian nantinya di persidangan, maka dalam penyidikan merupakan langkah awal pemeriksaan yang mana akan digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan selanjutnya, yaitu penuntut umum, hakim, maupun terdakwa itu sendiri atau penasehat hukumnya. Oleh karena itu dalam tahap penyelidikan dan penyidikan diharapkan bisa difungsikan secara maksimal. Sehingga hasil dari penyidikan

yang dilakukan dapat digunakan dan berisi secara lengkap dan adanya cukup bukti untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya.

Berita acara penyidikan merupakan surat yang dibuat pejabat kepolisian yang berwenang (penyidik) tentang kejadian/keadaan yang didengar, dilihat, dialami oleh para saksi. Akan tetapi keterangan saksi merupakan apa yang saksi nyatakan di persidangan. Keterangan saksi di depan penyidik bukan keterangan saksi yang mempunyai nilai pembuktian. Pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan itu sendiri merupakan suatu tindakan awal dari penyidik untuk dapat melanjutkan proses hukum ke pemeriksaan di sidang pengadilan yang merupakan puncak proses pembuktian. Peranan berita acara pemeriksaan penyidikan tidak lepas dari hubungannya dengan pembuktian dalam persidangan. Memang berita acara pemeriksaan penyidikan tidak murni digunakan dalam persidangan, karena masih ada proses dari penuntut umum sebelum ke pengadilan. Sedikit banyak berita acara penyidikan telah diubah dan ditambah untuk dilengkapi sehingga dengan adanya berita acara penyidikan dapat diketahui cukup bukti untuk meneruskan perkara tersebut ke pengadilan.

Dalam memulai proses pembuktian, hakim tentunya akan mengacu pada berkas perkara yang dibuat oleh penyidik. Disinilah dimulainya peranan dari berita acara pemeriksaan penyidikan. Berkas perkara dari penyidik digunakan sebagai dasar acuan bagi hakim untuk memulai memeriksa suatu perkara dalam persidangan. Selain itu pula, suatu berita acara penyidikan dapat dimasukkan

dalam keterangan terdakwa diluar persidangan. Dengan ketentuan bahwa keterangan yang diberikannya tersebut dalam pemeriksaan penyidikan, dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan, serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa itu sendiri. Sehingga keterangan yang diberikan terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan.

Sedangkan dalam hubungannya antara berita acara penyidikan dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi, yang mana mungkin terjadi perbedaan antara yang diucapkannya dalam persidangan dengan yang telah ada di berita acara penyidikan, maka hakim dapat menggunakan berita acara penyidikan menjadi bahan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada saksi yang bersangkutan. Dengan melihat berita acara pemeriksaan penyidikan, hakim juga akan mengetahui sejauh mana perbedaan keterangan yang diberikan oleh saksi dan juga akan didapat pula alasan dari saksi tersebut. Peranan berita acara penyidikan hanya sampai pada tahap tersebut apabila hakim meyakini keterangan yang benar adalah keterangan yang dinyatakan dalam persidangan.

Berita acara pemeriksaan penyidikan memang sebagai bahan acuan untuk memulai suatu pemeriksaan perkara, akan tetapi dalam mengambil keputusan hakim bertumpu pada berita acara persidangan. Hal-hal yang didapat dari jalannya persidangan itulah yang digunakan untuk mengambil putusan. Dari sini bisa didapat suatu kesimpulan bahwa peranan berita acara penyidikan bukan

hanya sebagai bahan acuan pemeriksaan. Karena apabila dalam jalannya persidangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh masing-masing pihak baik saksi maupun terdakwa dalam penyidikan, maka dapat digunakan pula untuk mengusut ataupun memperjelas hal-hal yang tidak sesuai tersebut. Akan tetapi yang memegang kendali adalah tetap pada pundak hakim. Karena hakimlah yang menentukan jalannya persidangan. Apabila hal-hal yang tercantum dalam berita acara penyidikan memang tidak benar semuanya, dan keyakinan hakimlah dalam hal ini digunakan, apakah akan tetap menggunakan keterangan yang ada di berita acara penyidikan atau akan menggunakan keterangan yang dinyatakan dalam sidang, yang tentunya keduanya belum tentu seratus persen benar. Memang sulit bagi hakim untuk mengetahui dan memeriksa suatu perkara yang memang sangat berbeda jauh dengan yang ada dalam berita acara penyidikan.

B. Keabsahan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sebagai Alat Bukti Surat dalam Sidang Peradilan Pidana (Studi Kasus: Surat Tuntutan (P-42) Putusan No. 1799/Pid.B/2012/PN.Mks)

Berita acara penyidikan merupakan surat yang dibuat pejabat kepolisian yang berwenang (penyidik) tentang kejadian/keadaan yang didengar, dilihat, dialami oleh para saksi. Akan tetapi keterangan saksi merupakan apa yang saksi nyatakan di persidangan. Keterangan saksi di depan penyidik bukan keterangan

saksi yang mempunyai nilai pembuktian. Pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan itu sendiri merupakan suatu tindakan awal dari penyidik untuk dapat melanjutkan proses hukum ke pemeriksaan di sidang pengadilan yang merupakan puncak proses pembuktian.

Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem negative menurut Undang-undang, dimana terkandung dalam Pasal 294 ayat 1 RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi:

“Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”

Jadi, dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasib si terdakwa adalah keyakinan hakim. Sehingga, walaupun bukti bertumpuk-tumpuk namun hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, ia harus membebaskannya. Karena itu, dalam tiap-tiap putusan pidana, hakim dalam menjatuhkan hukuman memuat pertimbangan dalam putusan seperti “bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa”. Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa yang menjadi alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti surat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP mengklasifikasikan surat kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- (a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dialami oleh pejabat umum itu sendiri;
- (b) Surat yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang menurut tata laksana untuk pembuktian;
- (c) Surat keterangan ahli; dan
- (d) Surat lain yang ada hubungan isi dengan alat bukti lainnya.

Jadi, pada dasarnya berdasarkan Pasal 187 huruf (a) di atas, surat yang termasuk alat bukti surat yang disebut disini ialah surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya, tapi agar surat resmi yang bersangkutan dapat bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana, surat resmi itu harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami si pejabat. Berdasarkan penelitian dalam bentuk wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, penyidik yang bertugas membuat suatu BAP penyidikan, tidak dapat dikategorikan sebagai “pejabat umum” karena seorang penyidik berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP adalah pejabat kepolisian RI atau pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik harus dan wajib polisi tertentu saja, atau boleh juga PPNS yang telah terlatih dan ditugaskan untuk itu. Ini berarti tidak semua polisi boleh dan bisa menjadi penyidik Walaupun dalam prakteknya dari hasil penelitian penulis,

beberapa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya kerap kali menjadikan BAP sebagai alat bukti surat dalam proses persidangan dengan mengacu pada Pasal 187 huruf (a) KUHAP sehingga hal tersebut memunculkan perbedaan pendapat antara hakim dan jaksa dalam suatu proses persidangan.

Terkait dengan permasalahan yang penulis angkat mengenai keabsahan BAP penyidikan saksi yang dijadikan sebagai alat bukti surat dalam surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam suatu perkara pidana, akan lebih tepat jika suatu BAP penyidikan (dalam hal ini dikhususkan pada BAP saksi) yang dibuat oleh seorang penyidik dikualifikasi sebagai bahan bagi pembuktian atau dengan kata lain dijadikan sebagai bahan acuan untuk memulai suatu pemeriksaan perkara daripada sebagai alat bukti, sebab proses dalam pembuatan BAP tersebut adalah bagian dari persidangan itu sendiri dalam suatu proses dalam perkara pidana atau dapat dikatakan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan itu sendiri merupakan suatu tindakan awal dari penyidik untuk dapat melanjutkan proses hukum ke pemeriksaan di sidang pengadilan yang merupakan puncak proses pembuktian. Lagipula, berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa kualitas keterangan saksi itu harus dinyatakannya di persidangan sehingga keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti yang sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkas perkara dari penyidik digunakan sebagai dasar acuan bagi hakim untuk memulai memeriksa suatu perkara dalam persidangan. Selain itu pula berita acara penyidikan dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti dipersidangan. Sedangkan dalam hubungannya antara berita acara penyidikan dengan keterangan yang diberikan oleh para saksi, yang mana mungkin terjadi perbedaan antara yang diucapkannya dalam persidangan dengan yang telah ada di berita acara penyidikan, maka hakim dapat menggunakan berita acara penyidikan menjadi bahan untuk mempertanyakan hal tersebut kepada saksi yang bersangkutan. Peranan berita acara penyidikan bukan hanya sebagai bahan acuan pemeriksaan, karena apabila dalam jalannya persidangan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan berita acara yang dibuat oleh masing-masing pihak baik saksi maupun terdakwa dalam penyidikan, maka dapat digunakan pula untuk mengusut ataupun memperjelas hal-hal yang tidak sesuai tersebut. Berita acara

pemeriksaan penyidikan memang sebagai bahan acuan untuk memulai suatu pemeriksaan perkara, akan tetapi dalam mengambil keputusan hakim bertumpu pada berita acara persidangan.

2. Akan lebih tepat jika suatu BAP penyidikan saksi yang dibuat oleh seorang penyidik dikualifikasi sebagai bahan bagi pembuktian atau dengan kata lain dijadikan sebagai bahan acuan untuk memulai suatu pemeriksaan perkara daripada sebagai alat bukti, sebab proses dalam pembuatan BAP tersebut adalah bagian dari persidangan itu sendiri dalam suatu proses dalam perkara pidana atau dapat dikatakan bahwa pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan itu sendiri merupakan suatu tindakan awal dari penyidik untuk dapat melanjutkan proses hukum ke pemeriksaan di sidang pengadilan yang merupakan puncak proses pembuktian. BAP dibuat berdasarkan keterangan saksi atau terdakwa. Bukan, berdasarkan apa yang didengar, dilihat atau yang dialami oleh penyidik secara langsung.

B. Saran

1. Penyidikan merupakan langkah awal pemeriksaan, oleh karena itu dalam tahap penyidikan diharapkan bisa difungsikan secara maksimal. Sehingga hasil dari penyidikan yang dilakukan dapat digunakan dan

berisi secara lengkap dan adanya cukup bukti untuk melanjutkan ke tingkat berikutnya.

2. Pemeriksaan di muka persidangan dan segala hal yang terjadi di dalamnya merupakan tanggungjawab, hak, dan kewajiban bagi seorang hakim untuk memimpinnya, sehingga dari hakim itu sendiri dituntut kemampuan kecakapan hukum dan penguasaan yang mendalam mengenai penilaian kekuatan pembuktian yang diatur dalam hukum acara pidana serta ditambah dengan keyakinan dari hakim yang memiliki sifat aktif dalam perkara pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Garfika, 2013.

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013.

Dirjosisworo, Soedjono, *Kriminalistik*, Bandung: Tribisono Karya, 1976.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Jilid 2*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta Penjelasan Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1981.

Sumber lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

alat-bukti-surat-menurut-hukum-acara.blogspot.com

berita-acara-pemeriksaan-bukan-alat-bukti-surat@hukumonline.com

kekuatan-pembuktian-bap-saksi-di-persidangan@hukumonline.com

LAMPIRAN